



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

- 
- Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : 1  
Rapat ke : 16  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : 1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;  
2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 25 September 2018  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Acara : Agenda dengan Dewas BPJS Ketenagakerjaan:  
1. Laporan Kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2018;  
2. Agenda Dewas BPJS Ketenagakerjaan ke depan dalam perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja (Dalam dan Luar Negeri) Tahun 2019;
- Agenda dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan:  
1. Realisasi dan upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Pelaut Anak Buah Kapal dan Pelaut Perikanan sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;  
2. Proses kerjasama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Asosiasi Profesi (seperti Peradi, IAI, Ikatan Notaris Indonesia; dan lain-lain) di Indonesia.
- Ketua Rapat : DR.H.Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir : A. 24 orang dari 46 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
2 orang anggota izin;

- B. Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono beserta jajaran.
- C. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto beserta jajaran;

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.20 WIB, maka sesuai Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja dalam perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan sosial kepada pekerja sesuai *road map* dengan intansi baik pemerintah maupun swasta.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerja sama dengan BNP2TKI dan Kementerian dan lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memberikan perlindungan jaminan sosial dan perlindungan asuransi di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang bekerja melalui BNP2TKI dan PMI mandiri.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kinerja kepesertaan program jaminan sosial PMI dan masukan-masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi yang ada sebagaimana diharapkan Komisi IX DPR RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB.

Ketua Rapat/  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,

  
**DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA**

A-460